

Strategi Wacana Diplomatik Tiongkok dalam Perang Dagang dengan Amerika Serikat: Sebuah Perspektif Pragmatik

Sugiyo, Yasir Mubarak

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
*dosen00695@unpam.ac.id; dosen02264@unpam.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi wacana diplomatik Tiongkok dalam menyikapi perang dagang dengan Amerika Serikat (AS) melalui analisis tindak tutur yang didasarkan pada teori Searle. Fokus analisis adalah pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, pada konferensi pers 8, 10, dan 14 April 2025. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dari transkrip resmi dan dianalisis melalui model interaktif Miles dkk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak tutur asertif paling dominan, diikuti direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Fungsi dan makna tindak tutur asertif digunakan untuk membentuk persepsi global yang menggambarkan AS sebagai pihak irasional. Tindak tutur direktif berfungsi dan bermakna menunjukkan dorongan agar AS menghentikan kebijakan tarif dan memilih dialog. Fungsi dan makna tindak tutur komisif untuk menegaskan komitmen Tiongkok dalam membela kepentingan nasional. Tindak tutur ekspresif berfungsi dan bermakna mengungkapkan emosi dan sikap Tiongkok. Fungsi dan makna tindak tutur deklaratif sebagai wujud tindakan langsung yang dilakukan pemerintah Tiongkok, misalnya dengan memberi sanksi berupa pembatasan visa bagi tentara AS. Temuan ini menunjukkan upaya Tiongkok dalam menyampaikan pandangan, membentuk opini global, dan menunjukkan sikap diplomatik melalui tindak tutur. Semua itu berperan penting dalam membangun status dan otoritas dalam wacana politik internasional. Studi ini menekankan bahwa bahasa diplomatik bersifat ideologis dan performatif. Studi ini memperkuat pemahaman bahwa bahasa diplomatik bukanlah cara komunikasi yang netral, tetapi alat yang digunakan oleh negara-negara untuk mengekspresikan sikap ideologis, membangun identitas, dan memengaruhi persepsi publik global. Penelitian selanjutnya disarankan membandingkan wacana dari kedua negara dan mempertimbangkan aspek non-verbal yang dapat memengaruhi pesan diplomatik.

Kata kunci: Amerika Serikat; perang dagang; tindak tutur; Tiongkok

China's Diplomatic Discourse Strategy in the Trade War with the United States: A Pragmatic Perspective

This study aims to analyze China's diplomatic discourse strategy in responding to the trade war with the United States (US) through speech act analysis based on Searle's theory. The focus of the analysis is the statements of the Chinese Ministry of Foreign Affairs spokesperson, Lin Jian, at press conferences on April 8, 10, and 14, 2025. Using a descriptive qualitative approach, data were collected from official transcripts and analyzed through Miles et al.'s interactive model. The results show that assertive speech acts are the most dominant, followed by directives, commissives, expressives, and declaratives. The function and meaning of assertive speech acts are used to shape global perceptions that portray the US as irrational. Directive speech acts function and meaning to show encouragement for the US to stop tariff policies and choose dialogue. The function and meaning of commissive speech acts are to emphasize China's commitment to defending national interests. Expressive speech acts function and meaning to reveal China's emotions and attitudes. The function and meaning of declarative speech acts are a form of direct action taken by the Chinese government, for example, by imposing sanctions in the form of visa restrictions for US soldiers. These findings demonstrate China's efforts to convey views, shape global opinion, and demonstrate diplomatic attitudes through speech acts. All of these play a crucial role in constructing status and authority in international political discourse. This study emphasizes the ideological and performative nature of diplomatic language. This study reinforces the understanding that diplomatic language is not a neutral means of communication, but rather a tool used by states to express ideological stances, construct identities, and influence global public perception. Future research is recommended to compare the discourses of both countries and consider non-verbal aspects that may influence diplomatic messages.

Keywords: China; speech acts; trade war; United States

Received: 02th May 2025; Revised: 16th June 2025; Accepted: 27th July 2025; Available online: 11th October 2025;
Published regularly: December 2025

Copyright © 2025 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
All rights reserved.

*Corresponding author: Sugiyo, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
E-mail address: dosen00695@unpam.ac.id

PENDAHULUAN

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah muncul sebagai salah satu isu yang paling menonjol dalam dinamika geopolitik dan ekonomi global sejak tahun 2018 (Debora, 2025). Pemerintahan Trump menuduh Cina terlibat dalam pencurian kekayaan intelektual, manipulasi mata uang, dan memberikan subsidi yang tidak adil kepada perusahaan-perusahaan dalam negerinya. Ketegangan meningkat ketika kedua negara memberlakukan tarif impor terhadap produk satu sama lain, dengan nilai mencapai ratusan miliar dolar (Weller, 2025). Konflik antara Amerika Serikat dan Cina tumbuh lebih intens pasca-epidemi (Choi, 2023; Kuik, 2021; Ong & Hoo, 2024; Rolf & Schindler, 2023; Roper, 2024; Scobell, 2024).

Konflik ini ditandai tidak hanya oleh kebijakan ekonomi seperti peningkatan tarif dan pembatasan perdagangan, tetapi juga oleh perang retorika yang tercermin dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh kedua negara. Dalam konteks ini, bahasa berperan sebagai instrumen strategis untuk membentuk persepsi global, mempertahankan posisi nasional, dan menanggapi tekanan internasional. Oleh karena itu, di balik ketegangan ekonomi terdapat strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh setiap pihak untuk mengartikulasikan posisi, tuntutan, dan bahkan ancaman. Hal ini dipertegas oleh Yongtao (dalam Zou & Zhu, 2023) bahwa makna bahasa secara intrinsik bersifat dinamis, beragam, dan dapat diperdebatkan. Beberapa penelitian sebelumnya telah menganalisis perang dagang AS-Tiongkok dari berbagai perspektif, termasuk ekonomi dan politik internasional (Badiri, 2020; Fajgelbaum & Khandelwal, 2022; Swenson & Woo, 2019; Wambrauw & Menufandu, 2022), hubungan diplomatik (Boylan et al., 2021; Huang & Wang, 2021; Tang, 2023), studi media (Willnat et al., 2022; D. Zhang, 2022) dan opini publik (Hua & Zeng, 2022; Lai, 2019; Zhang, 2023). Di sisi lain, pendekatan linguistik telah banyak dikaji untuk mengeksplorasi strategi wacana politik, meskipun sebagian besar penelitian ini masih terfokus pada analisis wacana kritis dalam konteks kebijakan luar negeri (Li, 2020; Liyang et al., 2020; Ng, 2021; Zhou & Qin, 2020), naratif (Hopewell, 2021), dan retorika (Schweinberger, 2022). Namun, hanya sedikit studi yang mengeksplorasi strategi komunikasi Tiongkok dikonstruksi untuk membentuk narasi politik atau merespons tekanan dari AS di kancah internasional.

Sebagai negara dengan tradisi diplomasi yang terorganisir (Kornphetcharat & Thien, 2025; Rana, 2005), Tiongkok secara aktif memanfaatkan saluran komunikasi resmi untuk menyampaikan posisinya. Salah satu tokoh kunci dalam strategi komunikasi eksternal Tiongkok adalah juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian, yang secara teratur menyampaikan pandangan pemerintah selama konferensi pers. Melalui analisis pernyataan Lin Jian ini dapat ditelusuri cara Tiongkok membingkai isu perang dagang dan strategi komunikasinya. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih terfokus pada pemeriksaan pidato-pidato konferensi Presiden Xi (Gallelli & Heinrich, 2018; Swaine, 2015; X. Wang, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis pragmatik dari pernyataan-pernyataan resmi tersebut dengan menggunakan kerangka tindak tutur Searle (1969). Hal ini untuk menginvestigasi cara bahasa digunakan dalam menangani tekanan internasional dan membangun narasi diplomatik nasionalnya. Penelitian ini menawarkan sudut pandang baru terkait cara bahasa dan strategi diplomatik berinteraksi dalam wacana diplomatik Tiongkok modern. Data diambil pada bulan April 2025 sehingga studi ini menawarkan analisis tindak tutur yang kontekstual dan kontemporer. Aspek kebaruan lain dari penelitian ini terletak pada pilihan fokus terhadap aktor diplomatik yang kerap terabaikan dalam kajian wacana, yakni juru bicara kementerian luar negeri. Perang dagang antara Tiongkok dan AS merupakan isu internasional yang kompleks dan berkelanjutan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sikap Tiongkok, penting dilakukan telaah cara membingkai isu ini dalam pernyataan resminya, terutama yang ditujukan kepada masyarakat internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi diplomatik serta makna yang terkandung di balik wacana resmi yang disampaikan oleh pemerintah Tiongkok, khususnya melalui pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini dirancang untuk

menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: *pertama*, jenis tindak tutur yang digunakan oleh Lin Jian dalam pernyataannya mengenai perang dagang antara Tiongkok dan AS; dan *kedua*, fungsi serta makna dari tindak tutur dalam membangun narasi diplomatik yang merepresentasikan posisi Tiongkok dalam konflik perdagangan tersebut.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif karena memungkinkan untuk menggali secara mendalam makna terhadap fenomena sosial atau manusia (Creswell & Creswell, 2023). Pendekatan ini sering digunakan untuk memahami secara mendalam aktivitas, peristiwa, situasi, atau artefak sosial, serta untuk mengungkap makna yang melekat pada pengalaman sosial tersebut (Leavy, 2023). Adapun metode deskriptif dalam kerangka kualitatif merujuk pada cara analisis yang menjaga kedekatan dengan data empiris, meminimalkan interpretasi berlebihan, dan menyusun temuan dalam bentuk tema-tema utama (Creswell & Creswell, 2023). Oleh karena itu, pendekatan ini dipandang sesuai untuk menelaah makna, fungsi, dan strategi komunikasi dalam pernyataan resmi pemerintah Tiongkok, khususnya melalui penggunaan tindak tutur oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian. Penelitian ini berlandaskan pada teori tindak tutur dari Searle (1969) yang digunakan sebagai kerangka analisis. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan mengungkap strategi penggunaan bahasa yang dilakukan oleh juru bicara pemerintah Tiongkok dalam membentuk persepsi internasional selama konflik perdagangan antara AS dan Tiongkok.

Data diambil dari situs web resmi <https://www.mfa.gov.cn/eng/> Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 8, 10, dan 14 April 2025. Data ini berupa transkrip konferensi pers yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian. Data tersebut dipilih karena merupakan pernyataan resmi dan terkini mengenai masalah-masalah yang terkait dengan perang dagang dan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap AS.

Penelitian ini menggunakan metode simak sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Langkah metode simak meliputi: menyimak pemakaian bahasa, baik dalam bentuk tuturan lisan maupun tulisan, yang kemudian digunakan sebagai sumber data linguistik (Mahsun, 2017). Dalam konteks penelitian ini, metode simak dilakukan terhadap tuturan resmi yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam konferensi pers daring. Teknik simak yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak bebas libat cakap. Dalam hal ini peneliti hanya bertindak sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam peristiwa tutur (Mahsun, 2017). Peneliti tidak berpartisipasi dalam proses komunikasi, melainkan menyimak dan mencatat secara pasif tuturan yang telah tersedia secara publik dalam bentuk rekaman dan transkrip konferensi pers.

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data berdasarkan dokumen. Dokumen merupakan rekaman atas suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Bentuk dokumen dapat berupa teks tertulis, visual seperti gambar, atau hasil karya monumental yang dihasilkan oleh individu tertentu (Sugiyono, 2013). Dalam hal ini, dokumen yang dimaksud adalah transkrip resmi pernyataan juru bicara pemerintah Tiongkok yang diperoleh dari situs web Kementerian Luar Negeri Tiongkok (www.mfa.gov.cn). Dokumen dipilih berdasarkan relevansinya terhadap isu konflik perdagangan antara Tiongkok dan AS, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan tarif dan respons diplomatik.

Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif dari Miles dkk. (2014), yang terdiri atas empat komponen utama, yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keempat komponen ini tidak berjalan secara linier, melainkan berlangsung secara simultan dan saling memengaruhi selama proses analisis. Pada tahap pengumpulan data, dilakukan pencatatan tuturan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian. Sumber data diperoleh dari transkrip resmi yang tersedia di situs web www.mfa.gov.cn. Setelah itu, data yang terkumpul dikondensasi dengan cara menyeleksi dan mengklasifikasikan setiap ujaran ke dalam lima kategori tindak tutur, meliputi: representatif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif

(Searle, 1969). Data yang telah diklasifikasikan kemudian disajikan dalam bentuk tabel, kutipan, atau narasi untuk memudahkan interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi simpulan, yakni menganalisis fungsi dan makna tindak tutur dalam konteks komunikasi diplomatik. Temuan diverifikasi dengan mengaitkan antara konteks ujaran, teori pragmatik, dan latar belakang politik yang melingkupi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari data transkrip konferensi pers resmi yang disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, pada tanggal 8, 10, dan 14 April 2025 mengungkapkan tindak tutur asertif (33.33%) paling dominan, diikuti oleh direktif (31,58%), komisif (17,54%), ekspresif (12,28%), dan deklaratif (5,26%) dengan tutur yang paling jarang digunakan dalam konteks ini. Tabel 1 menyajikan hasil klasifikasi tindak tutur yang terdapat dalam ketiga publikasi resmi tersebut.

Tabel 1. Distribusi Tindak Tutur

No	Jenis Tindak Tutur	Jumlah Tuturan	Persentase (%)
1	Asertif	19	33.33%
2	Direktif	18	31.58%
3	Komisif	10	17.54%
4	Ekspresif	7	12.28%
5	Deklaratif	3	5.26%
Total		57	100%

Berikut ini adalah klasifikasi dan analisis jenis-jenis tindak tutur yang digunakan dalam pernyataan Lin Jian.

Asertif

Tindak tutur asertif mencerminkan maksud pembicara yang didasarkan pada kebenaran proposisi yang disampaikan. Tindak tutur asertif termasuk menyatakan (*explaining*), melaporkan (*reporting*), mengungkapkan (*showing*) pendapat, dan menyebutkan sesuatu (*mentioning*). Semuanya bertujuan untuk menyampaikan informasi.

Data 1:

The U.S. uses tariff as a weapon to exert maximum pressure for its own selfish gains, which severely hurts the legitimate rights and interests of all countries...

(AS menggunakan tarif sebagai senjata untuk memberikan tekanan maksimal demi keuntungan pribadinya, yang sangat merugikan hak dan kepentingan sah semua negara...)

Tindak tutur ini bersifat asertif karena menyampaikan penilaian faktual dan pendapat pemerintah Tiongkok mengenai kebijakan tarif AS. Fungsi dari tindak tutur ini adalah melaporkan (*reporting*) dan menunjukkan (*showing*) dari dampak negatif kebijakan tarif AS terhadap negara-negara lain. Tuturan ini bertujuan untuk menggambarkan AS sebagai pengganggu tatanan ekonomi global. Melalui tindak tutur yang tegas ini, Tiongkok berusaha membangun narasi negatif AS sebagai aktor yang egois dan mementingkan diri sendiri khususnya dalam perdagangan global. Hal ini tergambar dalam tuturan dengan menggambarkan penggunaan tarif sebagai alat untuk menekan sepihak dan keuntungan pribadi.

Data 2:

Tiongkok firmly rejects and will never accept such hegemonic and bullying move.

(Tiongkok dengan tegas menolak dan tidak akan pernah menerima tindakan hegemonik dan intimidasi seperti itu.)

Tuturan asertif pada Data 2 menyatakan (*stating*) Tiongkok secara tegas menolak tarif yang diberlakukan AS. Tuturan tersebut mengindikasikan bahwa pihak AS menindas dan hegemonik seperti pada tuturan *hegemonic* dan *bullying move*. Fungsi tindak tutur ini adalah untuk mengungkapkan sikap dan menyampaikan posisi politik kepada masyarakat internasional. Selain itu, tuturan ini merupakan cerminan dari ketegasan Tiongkok serta perlawanannya terhadap kebijakan yang dianggap merusak ekonomi saat ini. Pernyataan ini secara tidak langsung menunjukkan perlawanan bahwa Tiongkok tidak akan bekerja sama dengan kebijakan yang dianggap tidak adil.

Data 3:

Tariff and trade wars have no winner.

(Perang tarif dan perdagangan tidak memiliki pemenang).

Tuturan pada Data 3 adalah untuk menjelaskan (*explaining*) dampak buruk dari kebijakan perdagangan yang diberlakukan oleh AS. Tindak tutur ini berusaha untuk menyampaikan kepada pendengar bahwa pilihan yang optimal bukanlah kenaikan tarif, melainkan kolaborasi ekonomi yang saling menguntungkan. Perang dagang yang didorong oleh kebijakan tarif tidak akan menghasilkan pemenang sejati, tetapi justru akan berdampak buruk bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini secara implisit mengkritik AS sambil menggambarkan Tiongkok sebagai ‘peserta’ global yang kolaboratif dan berorientasi pada aturan yang memperjuangkan multilateralisme.

Direktif

Tindak tutur direktif merupakan tuturan penutur yang bertujuan untuk mendorong lawan bicara melakukan tindakan seperti memerintah (*ordering*), meminta (*begging*), menuntut (*demanding*) dan menasehati (*advising*).

Data 4:

We urge the U.S. to quit maximum pressure and resolve issues through dialogue on the basis of equality, respect and mutual benefit.

(Kami mendesak AS untuk menghentikan tekanan maksimal dan menyelesaikan masalah melalui dialog berdasarkan kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan.)

Tindak tutur direktif pada Data 4 tidak hanya mengungkapkan dorongan, tetapi juga mendesak (*demanding*) kepada pemerintah AS untuk meninggalkan kebijakan tarifnya dan menggunakan pendekatan dialogis yang menumbuhkan rasa saling menghormati. Hal ini secara implisit menggambarkan AS sebagai penghalang penyelesaian, sementara Tiongkok digambarkan sebagai pihak cinta damai melalui jalur diplomasinya.

Data 5:

We call on the U.S. to get its perspective right and make more tangible contributions to the development of Latin American and Caribbean countries, rather than make an effort to drive a wedge.

(Kami menghimbau AS untuk meluruskan perspektifnya dan memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap pembangunan negara-negara Amerika Latin dan Karibia, ketimbang berupaya memecah belah.)

Tindak tutur direktif pada Data 5 berfungsi sebagai seruan (*advising*) diplomatik kepada AS untuk mempertimbangkan kembali posisinya dan mengadopsi pendekatan yang lebih kooperatif dan membantu pembangunan negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Tuturan ini menggambarkan Tiongkok sebagai pendukung pembangunan dan keharmonisan regional, mendesak Amerika Serikat untuk terlibat secara konstruktif daripada memicu perselisihan. Pernyataan tersebut juga secara tidak langsung mengkritik secara halus AS yang berada dekat dengan kawasan tersebut.

Data 6:

A just cause enjoys the support of many.

(Sebuah tujuan yang adil mendapat dukungan dari banyak orang.)

Tuturan direktif Data 6 dapat diartikan sebagai ajakan bagi *audiens* atau pihak tertentu untuk mendukung suatu tujuan yang dianggap adil. Tuturan ini secara halus mendesak pendengar untuk mendukung apa yang dipandang sebagai ‘tujuan yang adil/*just cause*’ dengan menonjolkan fakta bahwa perjuangan yang adil niscaya akan memperoleh dukungan yang luas ‘*support of many*’. Fungsi tuturan ini adalah untuk memberi nasihat karena pembicara (Tiongkok) tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengarahkan pendengar ke arah posisi yang konsisten dengan nilai-nilai keadilan yang relevan. Secara tidak langsung, tuturan ini menggambarkan Tiongkok secara positif sementara AS kebalikannya. Ini artinya pemerintah AS dianggap memutuskan sepihak tanpa adanya dialog dengan negara lain dan dalam wacana diplomatik ini dianggap tidak adil dan arogan. Dalam tuturan tersebut, mengisyaratkan bahwa kebijakan tarif yang diberlakukan AS secara tidak langsung tidak akan didukung oleh negara lain karena dianggap keputusan egois dan tidak adil.

Komisif

Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang dianggap oleh pembicara sebagai komitmen untuk melakukan tindakan di masa mendatang. Tindak tutur komisif digunakan untuk menyampaikan janji (*promising*), sumpah (*vowing*), dan menawarkan sesuatu (*offering*), dan termasuk ancaman (*threatening*).

Data 7:

Tiongkok will take necessary measures to firmly safeguard its legitimate and lawful rights and interests.

(Tiongkok akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingannya yang sah dan sesuai hukum.)

Tuturan pada Data 7 termasuk tindak tutur komisif karena mengandung janji (*promising*) atau komitmen pemerintah Tiongkok untuk melindungi kepentingannya. Tuturan ini juga menjanjikan sekaligus memperingatkan AS. Pernyataan komisif ini sekaligus menegaskan kesiapan Tiongkok untuk bertindak guna melindungi kepentingan nasionalnya dan secara tidak langsung memperingatkan AS. Tiongkok tidak akan bersikap pasif, sebaliknya akan secara aktif melindungi kedaulatannya.

Data 8:

If the U.S. is determined to fight a tariff and trade war, Tiongkok's response will continue to the end.

(Jika AS bertekad untuk melawan perang tarif dan dagang, respons Tiongkok akan terus berlanjut hingga akhir.)

Tindak tutur pada Data 8 merupakan contoh tindak tutur komisif dalam bentuk sumpah (*vowing*). Tiongkok dengan tegas menegaskan tekadnya untuk tetap bereaksi terhadap perang dagang hingga perang dagang berakhir. Hal ini berlaku jika AS tetap bersikukuh memperpanjang perang.

Tindak tutur ini adalah untuk memaksa AS mengevaluasi kembali tindakannya. Pernyataan ini tidak hanya mengikat penutur (Tiongkok), tapi juga melanjutkan konfrontasi dengan AS sebagai bentuk pembelaan terhadap kepentingan Tiongkok.

Tindak tutur komisif ini dengan menandakan kesiapan Tiongkok untuk melakukan tindakan defensif atau pembalasan jika diprovokasi. Hal ini juga mengindikasikan tidak bersedianya untuk mengambil posisi pasif dalam menghadapi ancaman dalam perang dagang. Tindak tutur ini menggambarkan pemerintah Tiongkok sebagai pihak yang teguh dalam melindungi kepentingan nasionalnya sehingga memperkuat citra positif Tiongkok. Lebih jauh, pernyataan komisif ini juga mengindikasikan sebagai ancaman (*threatening*) diplomatik Tiongkok terhadap AS yang dianggap melanggar hak-hak dasar Tiongkok.

Data 9:

We will not sit idly by when the Chinese people's legitimate rights and interests are denied or when the international trade rules and the multilateral trading regime are undermined.
(Kami tidak akan tinggal diam ketika hak dan kepentingan sah rakyat Tiongkok diabaikan atau ketika aturan perdagangan internasional dan rezim perdagangan multilateral dirusak.)

Tuturan pada Data 9 merupakan tuturan yang mengandung janji. Lin Jian sebagai representasi negara Tiongkok, menegaskan bahwa pemerintah Tiongkok akan menanggapi ketidakadilan atau ancaman yang dirasakan terhadap kepentingan nasional dan sistem perdagangan global. Pernyataan ini secara implisit berfungsi sebagai peringatan kepada AS yang melanggar atau meremehkan prinsip atau norma perdagangan internasional. Hal ini juga menggambarkan negara Tiongkok sebagai negara yang tegas dan berasaskan diplomasi dialog yang baik. Amerika direpresentasikan sebagai negara yang egois dan tidak mengikuti aturan perdagangan internasional.

Ekspresif

Tindak tutur ekspresif merupakan tindak tutur yang menggambarkan psikologis pembicara terkait situasi tertentu. Tindak tutur ekspresif memiliki banyak fungsi, termasuk kritik (*criticizing*), keluhan (*complaining*), rasa terima kasih (*thanking*), sanjungan (*praising*), dan permintaan maaf (*apologizing*).

Data 10:

To hear words that lack knowledge and respect like those uttered by this Vice President is both surprising and kind of lamentable.
(Mendengar perkataan yang tidak berilmu dan tidak bermartabat seperti yang diucapkan oleh Wakil Presiden ini, sungguh mengejutkan dan agak menyedihkan.)

Tindak tutur ekspresif pada Data 10 merupakan tuturan yang berfungsi mengeluh (*complaining*). Hal ini tercermin pada tuturan yang berupaya mengomunikasikan reaksi emosional Lin Jian (Tiongkok) yang ditandai dengan ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap pernyataan yang dibuat oleh Wakil Presiden AS. JD Vance menyebut Tiongkok sebagai ‘petani Tiongkok (*Chinese peasants*)’, sebuah pernyataan yang dianggap tidak sopan atau merendahkan Tiongkok. Penggunaan istilah-istilah, seperti mengherankan (*surprising*) dan menyayangkan (*lamentable*) menunjukkan sudut pandang yang emosional. Hal ini ditandai dengan frasa ‘*lack knowledge and respect* (tidak memiliki pengetahuan dan rasa hormat). Secara tidak langsung, tuturan ini menggambarkan AS sebagai negara yang memiliki citra yang buruk.

Data 11:

Intimidation, threat and blackmail are not the right way to engage with Tiongkok.
(Intimidasi, ancaman dan pemerasan bukanlah cara yang tepat untuk terlibat dengan Tiongkok.)

Tuturan pada Data 11 merupakan tuturan ekspresif yang berfungsi mengeluh (*complaining*) sekaligus mengkritik (*criticizing*). Tuturan tersebut juga mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap sikap atau kebijakan AS terhadap Tiongkok yang dianggap melakukan intimidasi (*intimidation*), ancaman (*threat*), dan pemerasan (*blackmail*). Dengan menggunakan tuturan ekspresif ini, Tiongkok berusaha menyoroti ketidaktepatan strategi agresif AS sekaligus memosisikan Tiongkok sebagai negara yang bermoral. Tuturan ini berkontribusi dalam membangun simpati internasional dan membangun citra diri yang rasional serta berintegritas.

Data 12:

The U.S.'s hegemonic and bullying acts of exerting maximum pressure.

(Tindakan hegemoni dan intimidasi AS yang memberikan tekanan maksimal.)

Tuturan pada Data 12 merupakan tuturan ekspresif dengan fungsi mengkritik. Dalam tuturan ini, Tiongkok bertujuan untuk menggambarkan dirinya sebagai korban dari politik kekuasaan yang dilakukan AS. Hal ini diilustrasikan oleh istilah hegemoni (*hegemonic*) dan penindasan (*bullying acts*). Ini mengindikasikan bahwa tuturan di atas untuk mendelegitimasi tindakan AS pada dunia global dengan membungkainya sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak dapat diterima. Tuturan ini juga bertujuan untuk menjadikan Tiongkok mendapatkan simpati dunia dan menampilkan Tiongkok sebagai pendukung keadilan, menghormati antar-negara serta keterlibatannya berbasis aturan dalam urusan global.

Deklaratif

Tindak tutur deklaratif adalah tindak tutur yang mengubah status atau kondisi suatu entitas melalui ucapan, seperti: memutuskan (*deciding*), membatalkan (*canceling*) atau menikahkan (*marrying*).

Data 13:

Tiongkok decided to impose visa restrictions on U.S. personnel who have acted egregiously on the Xizang-related issues.

(Tiongkok memutuskan untuk memberlakukan pembatasan visa terhadap personel AS yang telah bertindak keterlaluan dalam masalah terkait Xizang.)

Tuturan pada Data 13 merupakan tindak tutur deklaratif yang berfungsi memutuskan (*deciding*). Dalam tuturan ini, pihak Tiongkok mengumumkan keputusan resmi yang secara langsung mengubah status hukum pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini prajurit AS. Lin Jian sebagai wakil Tiongkok tidak hanya menginformasikan, tetapi juga menerapkan perubahan melalui deklarasi pembatasan visa pada personel AS. Tindakan ini secara efektif menunjukkan kekuatan nasional Tiongkok terhadap pihak asing yang melanggar kedaulatannya. Tuturan ini dimaksudkan Tiongkok menghukum pihak atau campur tangan asing, seperti AS terhadap wilayah (Tiongkok) yang disengketakan, yaitu Xizang.

Pembahasan

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian selama konferensi pers pada tanggal 8, 10, dan 14 April 2025, beberapa hal penting dapat disimpulkan. *Pertama*, tindak tutur asertif (33,33%) yang paling sering muncul. Tindak tutur ini bersifat tegas karena mengomunikasikan penilaian dan opini pemerintah Tiongkok tentang kebijakan tarif AS. Tujuan dari tuturan asertif ini adalah untuk menggambarkan AS sebagai kekuatan yang mengganggu tatanan ekonomi global. Tiongkok berupaya membangun narasi negatif tentang AS sebagai aktor yang egois dan mementingkan diri sendiri, khususnya dalam konteks perdagangan global. Hal ini dicontohkan dalam pidato tersebut dengan menggambarkan penggunaan tarif sebagai alat untuk keuntungan pribadi dan tekanan sepihak. Misalnya, penggunaan tarif sebagai senjata untuk

memberikan tekanan maksimal demi keuntungan egoisnya sendiri. Tentu saja hal ini merugikan hak dan kepentingan sah semua negara.

Penggunaan tindak tutur asertif ini berupaya untuk mengomunikasikan posisi politik dan menunjukkan sikap kepada masyarakat internasional. Selain itu, tindak tutur digunakan untuk menunjukkan ketegasan Tiongkok dan penentangannya terhadap kebijakan yang dianggap merugikan ekonomi saat ini. Secara tidak langsung, tuturan ini dipakai untuk menunjukkan perlawanan dengan menyatakan bahwa Tiongkok dengan tegas menolak dan tidak akan pernah menoleransi tindakan hegemonik dan intimidasi AS. Hal ini untuk meyakinkan audiens (negara lain) bahwa tindakan yang paling menguntungkan bukanlah peningkatan tarif, melainkan kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif tidak akan menghasilkan pemenang sejati, tetapi justru akan berdampak buruk pada semua pihak yang terlibat.

Hal ini selaras dengan penelitian Badiri (2020) yang menyimpulkan bahwa faktor ekonomi memiliki peran krusial dalam pencapaian kepentingan nasional kedua negara. Demikian juga dengan penelitian Swenson & Woo (2019) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok memperkuat pengaruh global dan militernya. AS mengkhawatirkan praktik persaingan yang dianggap tidak adil, khususnya di sektor teknologi tinggi. Sementara itu, penelitian Fajgelbaum & Khandelwal (2022) menyimpulkan bahwa konflik dagang tersebut antara Tiongkok dan AS memiliki dampak secara ekonomi juga bagi negara lain di dunia. Hal ini dikuatkan oleh penelitian Wambrauw & Menufandu (2022) yang menyatakan bahwa eskalasi perang dagang turut mendorong perubahan dalam pertumbuhan ekonomi global, mengingat posisi strategis kedua negara dalam sistem perdagangan internasional.

Dari tuturan asertif ini, Tiongkok menggambarkan dirinya sebagai peserta global yang kolaboratif dan berorientasi pada aturan dan secara implisit mengkritik Amerika Serikat. Dalam penelitian Liu et al. (2023) menegaskan bahwa strategi diplomatik dan citra internasional Tiongkok menggarisbawahi komitmennya terhadap perdamaian, pembangunan, dan kerja sama. Itulah yang dilakukan Amerika Serikat selama pemerintahan Bush. Bush mengakui pentingnya diplomasi publik dalam mencapai keberhasilan. Hal ini selaras dengan penelitian Melissen (2005) yang menyatakan bahwa diplomasi publik dianggap sebagai instrumen penting (dan telah lama diabaikan) untuk membentuk opini dan menggerakkan publik asing agar secara langsung mendukung kepentingan dan tujuan AS. Hal ini dikuatkan oleh penelitian Rahmani & Saeed (2024) yang menyimpulkan bahwa bahasa merupakan instrumen yang ampuh sebagai sarana persuasi dan manipulasi dalam politik, seperti yang terlihat dari retorika, pidato, dan propaganda. Hal yang sama dipertegas oleh penelitian Veriza dkk. (2021) yang menemukan bahwa kemunculan tindak tutur asertif dalam pidato Presiden Moon mencerminkan praktik diplomasi publik.

Kedua, kemunculan yang paling sering dalam temuan data adalah tindak tutur direktif (31,58%). Tindak tutur direktif digunakan oleh Tiongkok tidak hanya mendorong, tetapi juga menuntut agar pemerintah AS menghentikan kebijakan tarifnya dan mengadopsi pendekatan dialogis yang mendorong rasa saling menghormati. Hal ini secara implisit menggambarkan AS sebagai penghalang penyelesaian. Tiongkok digambarkan sebagai entitas yang cinta damai melalui jalur diplomatiknya. Tindak tutur direktif lainnya digunakan sebagai metode untuk meminta dukungan negara lain bagi Tiongkok. Hal ini diilustrasikan pada Data 6 yang secara halus mendorong pendengar atau negara lain untuk mendukung apa yang dianggap sebagai *tujuan yang adil*.

Penekanannya pada perjuangan yang adil niscaya akan memperoleh dukungan yang luas. Hal ini senarai dengan penelitian Flusberg dkk. (2024) yang mengatakan bahwa saat berkomunikasi, individu harus memutuskan apa yang akan diungkapkan, apa yang akan dihilangkan, dan cara penyampaian pesan. Setiap tindakan komunikasi melibatkan proses pembungkaman pesan. Pemilihan bahasa dalam konteks ini memiliki konsekuensi yang cukup besar karena dapat membentuk pemikiran seseorang, memengaruhi respons emosional, dan mengarahkan perilaku orang lain dan dampaknya mencakup berbagai ranah penting seperti dalam wacana diplomasi. Hal ini menandakan

bahwa tindak tutur direktif difungsikan untuk mem-*framing* Tiongkok secara positif sedangkan Amerika Serikat dalam tuturan tersebut sebaliknya.

Dalam konteks hubungan diplomatik, sejumlah studi mengkaji bagaimana perang dagang AS-Tiongkok diposisikan dan dikomunikasikan secara strategis. Hal ini selaras dengan penelitian Tang (2023) bahwa menemukan bahwa melalui opini di media dapat membangun narasi perang dagang dan memperkuat citra positif Tiongkok sekaligus mencari mitra strategis. Studi ini juga menyoroti peran media Inggris/Barat sebagai mediator *soft-power* pemerintah Tiongkok, yang sekaligus membuka peluang dan batasan dalam praktik diplomasi kontra-hegemonik. Penelitian Huang & Wang (2021) menyimpulkan bahwa digitalisasi diplomasi publik Tiongkok di platform media sosial, seperti Weibo dan Twitter berfungsi untuk melegitimasi ideologi nasional dan mempromosikan citra Tiongkok sebagai kekuatan baru yang tangguh selama perang dagang. Pernyataan tersebut didukung penelitian Boylan dkk. (2021) yang menyimpulkan bahwa nasionalisme dipandang sebagai faktor penting yang memengaruhi strategi politik dan ekonomi kedua negara selama konflik tersebut.

Ketiga, kemunculan tindak tutur komisif sebesar (17,54%). Tuturan ini mengandung janji (*promising*) atau komitmen pemerintah Tiongkok untuk melindungi kepentingan negaranya dan memperingatkan AS. Tiongkok secara tegas dalam bentuk tuturan komisif menyatakan tekadnya untuk terus menanggapi perang dagang sampai akhir dan akan melakukan pembalasan jika diprovokasi. Tuturan ini berupaya meningkatkan citra Tiongkok sebagai negara yang tegas dan berdaulat di mata dunia dan menganggap AS sebagai pelanggar hak-hak dasar. Penelitian Rahmani & Saeed (2024) menyimpulkan bahwa pemimpin politik menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan, memengaruhi opini publik, dan mendapatkan dukungan. Hal ini didukung penelitian O'Brochta & Silva (2025) yang menyatakan bahwa bahasa merupakan alat untuk menyampaikan isyarat halus yang menunjukkan identitas nasional.

Dalam perspektif studi media, penelitian Zhang (2022) menunjukkan bahwa *Tiongkok Daily* cenderung mengedepankan narasi nasionalisme dengan gambaran positif tentang kebijakan dan praktik Tiongkok sedangkan *South Tiongkok Morning Post* mengusung pendekatan multikulturalisme dengan menghadirkan berbagai sudut pandang yang beragam dan bersaing terkait akses pasar dan reformasi ekonomi Tiongkok. Hal ini didukung penelitian Willnat dkk. (2022) yang menemukan bahwa paparan media secara signifikan memengaruhi pandangan warga AS terhadap Tiongkok. Adapun faktor-faktor seperti kosmopolitanisme dan patriotisme turut menentukan sikap warga kedua negara terhadap satu sama lain dan konflik perdagangan tersebut.

Keempat, tindak tutur ekspresif yang ditemukan dalam penelitian ini sebesar (12,28%) dari keseluruhan data. Meskipun demikian, tindak tutur ini memiliki fungsi penting dalam mengartikulasikan atau mengungkapkan sentimen, perspektif, atau kondisi psikologis Tiongkok terkait konflik perdagangan dengan AS. Hal ini dibuktikan pada Data 10. Pihak Tiongkok menggunakan tindak tutur ekspresif dengan istilah-istilah, seperti: *mengejutkan* dan *menyedihkan*, yang mencerminkan perspektif emosional. Hal ini ditandai dengan kata-kata *kurang pengetahuan* dan *rasa hormat*. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan dan kekecewaan, khususnya pernyataan yang dibuat oleh Wakil Presiden AS. JD Vance menyebut Tiongkok sebagai *Chinese peasants* (petani Tiongkok). Ini merupakan sebuah pernyataan yang dianggap tidak sopan atau merendahkan Tiongkok.

Wacana ekspresif ini secara tidak langsung mencirikan AS sebagai negara dengan reputasi negatif dan tidak beradab. Ungkapan ekspresif lainnya berfungsi untuk mengeluh dan mengutuk sebagai sarana perbedaan pendapat terhadap sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap sikap atau kebijakan AS. Selain itu, ungkapan tersebut menganggap AS melakukan intimidasi (*intimidation*), ancaman (*threat*), dan pemerasan (*blackmail*) terhadap Tiongkok. Hal ini selaras dengan penelitian Masrur dkk. (2023) yang menemukan bahwa tindak tutur ekspresif dalam pidato Presiden Xi Jinping berperan penting dalam retorika persuasif secara keseluruhan. Tindak tutur ini membangun hubungan baik, menyampaikan sikap emosional pembicara, dan secara signifikan melibatkan audiens. Dengan

menggunakan ungkapan terima kasih, penghargaan, dan daya tarik emosi lainnya, pembicara secara efektif menggunakan kekuatan bahasa untuk membangun hubungan baik, membangkitkan emosi, dan memengaruhi wacana politik sesuai dengan tujuan dan keuntungannya.

Temuan penelitian Zhao (2016) menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-21, Tiongkok telah menempatkan penekanan lebih besar pada kekuatan diskursif sebagai elemen penting dalam kebangkitannya di kancah internasional. Penelitian Huang (2022) dan Yuan (2023) menyimpulkan bahwa strategi diplomasi Tiongkok menandai pergeseran dari pendekatan tradisional yang moderat menjadi pendekatan yang lebih agresif, konfrontatif, dan vokal. Gaya diplomasi ini mulai menjadi terkenal pada pertengahan tahun 2010-an dan menjadi semakin nyata selama pandemi COVID-19. Istilah ‘prajurit serigala’ sendiri diambil dari film aksi Tiongkok berjudul *Wolf Warrior* yang menggambarkan kesetiaan militan dan patriotisme yang tegas. Hal ini didukung penelitian Yuan (2024) dan Liu et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa wacana diplomatik bertujuan untuk mengubah persepsi internasional, memperoleh dukungan, dan memengaruhi opini publik agar menguntungkan. Penelitian Duarte dkk. (2024) juga menguatkan hal tersebut yang menyebut bahwa Tiongkok telah memanfaatkan kekuatan wacana ‘*power discourse*’ untuk berinvestasi dalam perpaduan kekuatan lunak ‘*soft power*’ dan multilateralisme untuk mendorong terciptanya suasana global yang kondusif sekaligus untuk mempromosikan kebangkitan geopolitiknya.

Terakhir, tindak tutur deklaratif (5,26%) yang ditemukan paling sedikit. Tindakan deklaratif ini berfungsi memutuskan (*deciding*). Hal ini terkait status hukum para pihak yang terlibat dalam kasus di wilayah Xizang, yakni para prajurit AS. Tuturan ini secara efektif menunjukkan kekuatan nasional Tiongkok melalui deklarasi pembatasan visa pada prajurit AS. Tokoh-tokoh sering menyampaikan sudut pandang mereka terhadap isu yang sedang berlangsung dan memberi pengaruh melalui tindak tutur deklaratif. Hal ini senada dengan penelitian Pranoto (2024) yang menyimpulkan bahwa pendapat tokoh dapat membentuk opini publik, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Hasil penelitian Akbarzadeh & Saba (2024) menguatkan bahwa Tiongkok telah menerapkan strategi multi-aspek untuk berinteraksi dengan negara seperti Arab Saudi dan UEA melalui diplomasi, investasi ekonomi, langkah-langkah keamanan, dan budaya yang dikenal dengan istilah *soft power*. Hal ini selaras dengan penelitian Nye (2004) yang menyimpulkan bahwa *soft power* digunakan untuk memengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai-nilai, dan kebijakan yang menarik, sedangkan *hard power* bergantung pada paksaan atau kekuatan militer. Penelitian Dadoo (2024) menunjukkan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan platform, seperti: situs web dan media sosial untuk memengaruhi agenda internasional dengan menyoroti topik-topik tertentu dan membungkainya sesuai dengan tujuan strategis mereka. Melalui perwakilan diplomatik, pemerintah Tiongkok dapat memengaruhi wacana internasional, menentukan isu mana yang menarik perhatian dan bagaimana isu tersebut diinterpretasikan dan dipersepsikan. Hal ini selaras dengan temuan Oktaviani & Nursidah (2025) yang menyimpulkan bahasa diplomatik digunakan sebagai sarana untuk memperkuat kerja sama antarnegara, membangun citra positif di kancah global, serta menyebarkan nilai-nilai universal yang berkaitan dengan perdamaian, stabilitas, dan kemajuan ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa strategi diplomatik di balik wacana resmi pemerintah Tiongkok melalui lima tindak tutur, yakni: asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Fungsi dan makna tindak tutur asertif digunakan untuk membentuk persepsi global yang menggambarkan AS sebagai pihak irasional. Tindak tutur direktif berfungsi dan bermakna menunjukkan dorongan agar AS menghentikan kebijakan tarif dan memilih dialog. Fungsi dan makna tindak tutur komisif untuk menegaskan komitmen Tiongkok dalam membela kepentingan nasional. Tindak tutur ekspresif berfungsi dan bermakna mengungkapkan emosi dan sikap Tiongkok. Fungsi dan makna tindak tutur deklaratif sebagai wujud tindakan langsung yang dilakukan pemerintah Tiongkok, misalnya dengan memberi sanksi berupa pembatasan visa bagi tentara AS. Studi ini

menekankan bahwa bahasa diplomatik bersifat ideologis dan performatif. Studi ini memperkuat pemahaman bahwa bahasa diplomatik bukanlah cara komunikasi yang netral, tetapi alat yang digunakan oleh negara-negara untuk mengekspresikan sikap ideologis, membangun identitas, dan memengaruhi persepsi publik global. Penelitian selanjutnya disarankan membandingkan wacana dari kedua negara dan mempertimbangkan aspek non-verbal yang dapat memengaruhi pesan diplomatik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbarzadeh, S., & Saba, A. (2024). Tiongkok's Soft Power: Views from Saudi Arabia and the UAE. *Global Studies Quarterly*, 5(1) 1–14. <https://doi.org/10.1093/isagsq/ksae090>
- Badiri, I. (2020). Analisis Ekonomi Politik Internasional Dalam Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat–Tiongkok Periode 2018-2019. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(2), 147–157. <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26070>
- Boylan, B. M., McBeath, J., & Wang, B. (2021). US–Tiongkok Relations: Nationalism, the Trade War, and COVID-19. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 14(1), 23–40. <https://doi.org/10.1007/s40647-020-00302-6>
- Choi, J. (2023). The US-Tiongkok rivalry and Europe's choice. *Asia and the Global Economy*, 3(1), 100057. <https://doi.org/10.1016/j.aglobe.2023.100057>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage publications.
- Debora, Y. (2025, April 15). Sejarah perang dagang Amerika dan Tiongkok 2018 sampai 2025. *Tirto.Id*. Retrieved May 2, 2025, from <https://tirto.id/sejarah-perang-dagang-amerika-tiongkok-penyebab-dampak-efKX>
- Dodoo, J. O. (2024). The Use of Social Media in Public Diplomacy in US and Tiongkok. *International Journal of Innovative Research and Development*, 13(8), 60–70. <https://doi.org/10.24940/ijird/2024/v13/i8/AUG24005>
- Duarte, P. A. B., Gupta, A., & Delvaje, B. C. (2024). Multilateralism and Soft Power Made-in-Tiongkok: (re)Adjusting Role Conception to Meet International Expectations. *East Asia*, 41(4), 325–345. <https://doi.org/10.1007/s12140-024-09424-0>
- Fajgelbaum, P. D., & Khandelwal, A. K. (2022). The Economic Impacts of the US–Tiongkok Trade War. *Annual Review of Economics*, 14(1), 205–228. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-051420-110410>
- Flusberg, S. J., Holmes, K. J., Thibodeau, P. H., Nabi, R. L., & Matlock, T. (2024). The Psychology of Framing: How Everyday Language Shapes the Way We Think, Feel, and Act. *Psychological Science in the Public Interest*, 25(3), 105–161. <https://doi.org/10.1177/15291006241246966>
- Gallelli, B., & Heinrich, P. (2018). Building a community of shared destiny: The Belt and Road Initiative in the political speeches of Xi Jinping. In C. A. Mendes (Ed.), *Tiongkok's New Silk Road: An Emerging World Order* (pp. 21–37). London: Routledge.
- Hopewell, K. (2021). Strategic Narratives in Global Trade Politics: American Hegemony, Free Trade, and the Hidden Hand of the State. *The Chinese Journal of International Politics*, 14(1), 51–86. <https://doi.org/10.1093/cjip/poaa020>
- Hua, S., & Zeng, K. (2022). The US–Tiongkok Trade War: Economic Statecraft, Multinational Corporations, and Public Opinion. *Business and Politics*, 24(4), 319–331. <https://doi.org/10.1017/bap.2022.18>
- Huang, Z. A. (2022). “Wolf Warrior” and Tiongkok's digital public diplomacy during the COVID-19 crisis. *Place Branding and Public Diplomacy*, 18(1), 37–40. <https://doi.org/10.1057/s41254-021-00241-3>
- Huang, Z. A., & Wang, R. (2021). Exploring Tiongkok's digitalization of public diplomacy on Weibo and Twitter: A case study of the US–Tiongkok trade war. *International Journal of Communication*, 15(2021), 1912–1939. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/15105>

- Kornphetcharat, K., & Thien, L. Y. (2025). Tiongkok's cultural diplomacy and its engagement with the peranan community in Malacca. *International Review of Humanities Studies*, 10(1), 222–238. <https://doi.org/10.7454/irhs.v10i1.1348>
- Kuik, C.-C. (2021). The Twin Chessboards of US-Tiongkok Rivalry: Impact on the Geostrategic Supply and Demand in Post-Pandemic Asia. *Asian Perspective*, 45(1), 157–176. <https://doi.org/10.1353/apr.2021.0020>
- Lai, E. L. C. (2019). The US–Tiongkok trade war, the American public opinions and its effects on Tiongkok. *Economic and Political Studies*, 7(2), 169–184. <https://doi.org/10.1080/20954816.2019.1595330>
- Leavy, P. (2023). *Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches* (2nd ed.). The Guilford Press.
- Li, J. (2020). Sino-US Trade Friction in Western and Chinese Media: A Critical Discourse Analysis. *International Journal of Linguistics, Literature and Translation*, 3(3), 89–106. <https://al-kindipublisher.com/index.php/ijllt/article/view/1110>
- Liu, M., Yan, J., & Yao, G. (2023). Themes and ideologies in Tiongkok's diplomatic discourse – a corpus-assisted discourse analysis in Tiongkok's official speeches. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1278240>
- Liyang, W., Jiayi, W., & Qian, L. (2020). Critical Discourse Analysis of Sino-U.S. News Reports on Trade War: A Corpus-based Comparative Study. *English Language, Literature & Culture*, 5(3), 84. <https://doi.org/10.11648/j.ellc.20200503.12>
- Mahsun, M. (2017). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya* (2nd ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Masrur, M. F., Faizah, B. U., Rahmanita, N. I., Rajagukguk, T. A. P. M., & Xiang, S. (2023). The Art of Influence: Analyzing Xi Jinping's Illocutionary Speech Acts at Bo'ao Asia Forum 2022. *Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya*, 10(2), 207–223. <https://doi.org/10.26740/paramasastra.v10n2.p207-223>
- Melissen, J. (2005). The new public diplomacy: Between theory and practice. In J. Melissen (Ed.), *The new public diplomacy: Soft power in international relations* (pp. 3–27). New York: Palgrave Macmillan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Ng, D. (2021). Critical discourse analysis of 2010 Tiongkok–US trade dispute in the headlines of Western newsmagazines. In C. Shei (Ed.), *Tiongkok's contemporary image and rhetoric practice* (pp. 30-95). London: Routledge.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. New York: Public affairs.
- O'Brochta, W., & Silva, P. C. (2025). Language Cues and Perceptions of Nationalism. *Political Behavior*, 1–24. <https://doi.org/10.1007/s11109-025-10008-8>
- Oktaviani, N. R., & Nursidah, N. (2025). Membangun Citra Internasional Jepang: Strategi Bahasa Diplomatik Pidato Fumio Kishida di Konferensi Jepang-Ukraina untuk Promosi Pertumbuhan Ekonomi dan Rekonstruksi. *KIRYOKU*, 9(1), 172–183. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v9i1.172-183>
- Ong, K. Y., & Hoo, T. B. (2024). US-Tiongkok Strategic Competition and Southeast Asia. In H. H. Wang & M. L. Miao (Eds.), *Enhancing Global Governance in a Fragmented World: Prospects, Issues, and the Role of Tiongkok* (pp. 205–214). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-2558-8_17
- Pranoto, B. E. (2024). News Reports on Indonesia's Post-election 2024 from Selected National and International Newspaper: A Pragmatic Analysis. *Journal of Pragmatics Research*, 6(1), 89–112. <https://doi.org/10.18326/jopr.v6i1.89-112>

- Rahmani, H., & Saeed, A. R. (2024). The Power of Language: Exploring the Role of Language in Politics. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 8(8), 2063–2073. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2024.8080152>
- Rana, K. (2005). The Structure and Operation of Tiongkok's Diplomatic System. *Tionggok Report*, 41(3), 215–236. <https://doi.org/10.1177/00094455050504100301>
- Rolf, S., & Schindler, S. (2023). The US–Tiongkok rivalry and the emergence of *state platform capitalism*. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 55(5), 1255–1280. <https://doi.org/10.1177/0308518X221146545>
- Roper, B. S. (2024). Tiongkok's rise and the United States' response: implications for the global order and New Zealand/Aotearoa. Part II: The US response, emergence of a multi-polar order, and New Zealand/Aotearoa foreign policy-making. *Kōtuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online*, 19(4), 472–482. <https://doi.org/10.1080/1177083X.2024.2329219>
- Schweinberger, T. (2022). How promise breaking in trade rhetoric shapes attitudes toward bilateral US-Tiongkok trade cooperation. *Business and Politics*, 24(4), 463–490. <https://doi.org/DOI:10.1017/bap.2022.16>
- Scobell, A. (2024). Parsing Post-Pandemic U.S.–Tiongkok Competition: Mutual (Mis)Perceptions and Dueling Geostrategies. In *Tiongkok's Bilateral Relations and Order Transition in the Indo-Pacific* (pp. 67–93). World Scientific (Europe). https://doi.org/10.1142/9781800616318_0004
- Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swaine, M. D. (2015). Xi Jinping on Chinese foreign relations: The governance of Tiongkok and Chinese commentary. *Tiongkok Leadership Monitor*, 48(1), 1–13. https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm48ms_0.pdf
- Swenson, D. L., & Woo, W. T. (2019). The Politics and Economics of the U.S.-Tiongkok Trade War. *Asian Economic Papers*, 18(3), 1–28. https://doi.org/10.1162/asep_a_00710
- Tang, L. (2023). Othering as mediated soft-power practice: Chinese diplomatic communication of discourse about Tiongkok-US trade war through the British press. *Discourse, Context & Media*, 51, 100669. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2023.100669>
- Veriza, R. A., Sukyadi, D., & Triarisanti, R. (2021). Assertive Speech Act of President Moon Jae-In's Speeches as a Representation of South Korea Diplomacy Towards North Korea. In *Thirteenth Conference on Applied Linguistics (CONAPLIN 2020)* (pp. 486-493). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210427.074>
- Wambrauw, M., & Menufandu, D. N. (2022). Dampak Perang Dagang Terhadap Neraca Perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(4), 627–636. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i4.174>
- Wang, X. (2021). Construing Community with a Shared Future in President Xi Jinping's Diplomatic Discourse (2013–2018): The Role of Personal Pronouns *we* and *they*. *Critical Arts*, 35(3), 35–51. <https://doi.org/10.1080/02560046.2021.1985154>
- Weller, M. (2025, February 21). Perang dagang AS–Tiongkok 2018: Latar belakang, dampak ekonomi, reaksi pasar. *Investing.com*. Retrieved May 2, 2025, from <https://id.investing.com/analysis/perang-dagang-asTiongkok-2018-latar-belakang-dampak-ekonomi-reaksi-pasar-200247892>
- Willnat, L., Tang, S., Shi, J., & Zhan, N. (2022). Media Use and National Image: How Americans and Chinese Perceive the U.S.–Tiongkok Trade War. *International Communication Gazette*, 84(7–8), 633–654. <https://doi.org/10.1177/17480485221093000>
- Yuan, S. (2023). Tracing Tiongkok's diplomatic transition to wolf warrior diplomacy and its implications. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1-9. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02367-6>

- Yuan, S. (2024). Goodbye, Wolf Warrior: charting Tiongkok's transition to a more accommodating diplomacy. *International Affairs*, 100(5), 2217–2232. <https://doi.org/10.1093/ia/iiae218>
- Zhang, D. (2022). Multiculturalism in media representation. *Chinese Language and Discourse. An International and Interdisciplinary Journal*, 13(1), 99–121. <https://doi.org/10.1075/cld.21002.zha>
- Zhang, X. (2023). The U.S.-Tiongkok Trade War: Global news framing and public opinion in the digital age. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 67(2), 228–230. <https://doi.org/10.1080/08838151.2023.2173199>
- Zhao, K. (2016). Tiongkok's Rise and its Discursive Power Strategy. *Chinese Political Science Review*, 1(3), 539–564. <https://doi.org/10.1007/s41111-016-0037-8>
- Zhou, R., & Qin, S. (2020). A Critical Discourse Analysis of News Reports on Sino-US Trade War in "The New York Times". *English Language Teaching*, 13(10), 85–98. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1272201>
- Zou, L., & Zhu, Y. (2023). A Corpus-based Analysis of Diplomatic Directive Speech Acts. *International Journal of Linguistics, Literature and Translation*, 6(7), 36–44. <https://doi.org/10.32996/ijllt.2023.6.7.4>